

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Memasuki awal tahun 2020 dunia mengalami krisis kesehatan menghadapi pandemi Covid-19. Menurut WHO, Covid-19 adalah virus baru yang ditemukan dalam laporannya terjadi di Wuhan China pada Desember 2019. Meskipun sebelumnya dunia juga pernah mengalami pandemi atau wabah penyakit yang terjadi di antaranya wabah HIV/AIDS, SARS, MERS, Ebola. Namun di tengah kemajuan globalisasi saat ini, wabah pandemi menghadirkan sebuah tantangan yang jauh lebih besar bagi dunia (University, 2020).

Wabah penyakit ini jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 3, tergolong sebagai bencana non alam yang disebabkan oleh serangkaian peristiwa yang mengakibatkan munculnya wabah penyakit. Artinya bahwa bencana yang terjadi saat ini tidak hanya disebabkan karena faktor alam tetapi wabah penyakit dapat memicu bencana, bahkan relasi antara wabah penyakit dengan kerentanan sosial yang terjadi di masyarakat sangat kompleks.

Sementara itu pada tanggal 11 Maret 2020 dilansir dari situs resmi WHO menyatakan Covid-19 sebagai wabah pandemi. Bahkan dalam rilisnya WHO menyebut pandemi Covid-19 tidak hanya krisis kesehatan tetapi juga dapat berdampak pada sektor lainnya. Maka, salah satu aspek yang perlu dikaji dalam konteks ketahanan suatu daerah dan masyarakatnya dalam menghadapi wabah Covid-19. Karena wabah yang mengakibatkan krisis kesehatan menjadi krisis tata

kelola pemerintahan di seluruh dunia sedang diuji untuk mengambil langkah kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa manusia tetapi juga sektor-sektor kehidupan manusia (University, 2020). Menurut *World Health Organization*, Covid-19 dalam penyebarannya dapat melalui tetesan droplet saat batuk atau bersin.

Maka sesuai yang direkomendasikan WHO, setiap orang yang sedang beraktivitas di luar rumah harus melakukan *physical distancing* atau menjaga jarak minimal satu meter dengan seseorang yang mempunyai gejala pernapasan. Oleh karena itu penularan virus dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan lingkungan sekitar atau benda yang telah digunakan oleh orang yang terinfeksi (World Health Organization, 2020).

Berbeda dengan pandemi-pandemi lainnya, Covid-19 memiliki karakteristik pola penularan yang terjadi antara manusia dengan manusia. Sehingga dalam perkembangannya pandemi ini mengalami transmisi yang begitu cepat dan meluas ke berbagai wilayah. Pola yang demikian mengakibatkan Covid-19 sulit untuk dikendalikan karena terjadi pada saat interaksi sosial di masyarakat. Sedangkan pada umumnya, aktivitas masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi sosial. Dua hal yang berlawanan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas kebijakan untuk melakukan mitigasi atau penanganan menghadapi Covid-19. Sebab saat ini ketahanan suatu negara menjadi penentu keberhasilan menghadapi pandemi Covid-19.

Sementara di Indonesia proses penanggulangan bencana selama ini masih fokus pada penanggulangan bencana alam. Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun

20017 Pasal 48 disebutkan, tanggap darurat meliputi, (1) pengkajian secara cepat dan tepat, (2) penentuan status keadaan darurat bencana, (3) penyelamatan dan evakuasi, (4) pemenuhan kebutuhan dasar, (5) perlindungan terhadap kelompok rentan, (5) pemulihan. Hal tersebut karena kondisi geografis Indonesia yang rawan dengan bencana alam.

Sedangkan wabah Covid-19 berbeda dengan bencana alam pada umumnya yang terjadi pada suatu wilayah atau daerah tertentu. Wabah Covid-19 bersifat contagious, artinya mempunyai karakteristik yang cepat menyebar dalam sebuah jaringan tanpa mengenal batas suatu wilayah atau daerah. Istilah yang pertama kali digunakan oleh Giralamo Fracastor yang menulis tentang penyakit infeksius seperti flu (Mona, 2020).

Di Indonesia, wabah Covid-19 telah menyebar ke seluruh daerah-daerah, tidak terkecuali kota-kota besar salah satunya adalah Kota Yogyakarta. Bencana non alam berupa wabah penyakit ini telah membuat lokasi-lokasi sentral kegiatan masyarakat terhenti. Begitu pun dengan himbauan dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diterbitkan melalui surat edaran Wali Kota Yogyakarta No. 440/820/SE/2020 tentang Pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Dalam surat edaran tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat, antara lain, melaksanakan gerakan bersih-bersih, di tempat kerja, sekolah, balai pertemuan dan ruang terbuka. Menyediakan alat atau bahan pencegahan penyebaran virus dan membatasi kegiatan yang bersifat massal.

Sementara itu terkait dengan pencegahan adanya transmisi lokal dari pendatang yang akan masuk ke wilayah Kota Yogyakarta, pemerintah

mengeluarkan surat edaran No. 443/1051/SE/2020 dan No. 440/820/SE/2020 yang memuat kebijakan instruksi pemerintah kepada warga pendatang dari luar daerah dan pencegahan Covid-19. Surat edaran tersebut ditujukan kepada kecamatan sampai rukun warga (RW) yang berisi himbauan bagi warga pendatang yang wajib untuk melakukan isolasi/masa karantina mandiri selama 14 hari dan apabila terdapat gejala klinis seperti, batuk, flu, sesak nafas, segera melapor ke puskesmas terdekat. Demikian surat-surat edaran yang memuat kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani wabah Covid-19.

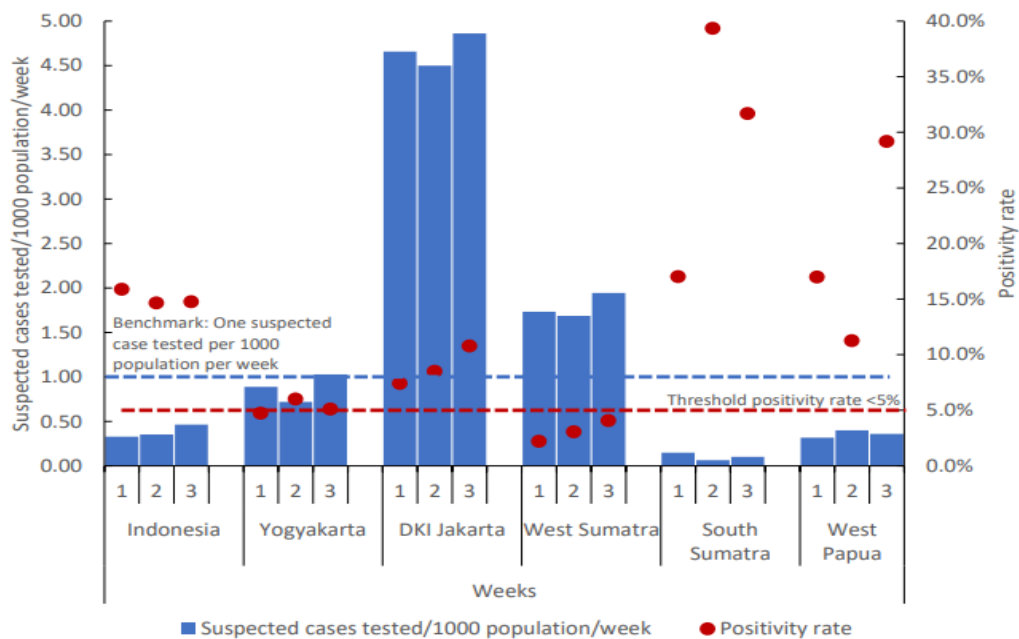
Table 1. Keputusan dan Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)

No	Peraturan	Nomor	Keterangan
1.	Keputusan Walikota	No. 415 Tahun 2020	Penetapan Standar Operasional Prosedur Shelter Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Yogyakarta
2.	Keputusan Walikota	No. 400 Tahun 2020	Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Serta Pemulihan Ekonomi Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Yogyakarta
3.	Keputusan Walikota	No. 298 Tahun 2020	Penetapan Mekanisme Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Yogyakarta
4.	Keputusan Walikota	No. 291 Tahun 2020	Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Yogyakarta

5.	Peraturan Walikota	No. 51 Tahun 2020	Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-19 Pada Masa Tatanan Normal Baru Di Kota Yogyakarta
----	--------------------	-------------------	--

Namun berdasarkan laporan situasi dari WHO per tanggal 2 September 2020, deteksi kasus yang dilakukan di Yogyakarta hanya sekali mencapai batas minimum test per minggu.

Gambar 1. Positivity Rate Covid-19 World Health Organization



Sumber: *World Health Organization, 2020*

Hal tersebut akan berpengaruh pada kecenderungan dan kerentanan penularan (*positivity rate*). Artinya bahwa masih terdapat potensi terjadinya transmisi kasus lokal yang terjadi akibat minimnya deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah kota. Sementara itu meskipun kebijakan pencegahan Covid-19 telah dikeluarkan, tidak sedikit kluster-kluster penularan yang bermunculan akibat virus Covid-19. Kluster Gereja di Kota Yogyakarta menjadi salah satu kluster yang ditemukan

setelah adanya jemaat yang mengikuti acara di Bogor dan Ungaran. Penularan terjadi karena adanya kegiatan di dalam lingkungan Gereja, sehingga warga Kota Yogyakarta yang mengikuti acara pada saat itu rentan terinfeksi virus (Kumparan, 2020). Sementara itu setelah adanya klaster Gereja, muncul kembali klaster baru, yaitu klaster yang berasal dari pedagang soto di Kota Yogyakarta.

Klaster tersebut hingga tanggal 2 September 2020 telah menginfeksi 13 warga, bahkan salah satu RT (Rukun Tetangga) yang berlokasi di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta melakukan karantina mandiri satu lingkungan (Kumparan, 2020). Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, pedagang soto tersebut mengabaikan penyediaan protokol kesehatan yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Seperti halnya menyediakan *thermo gun* dan tempat untuk mencuci tangan atau menyediakan *hand sanitizer*.

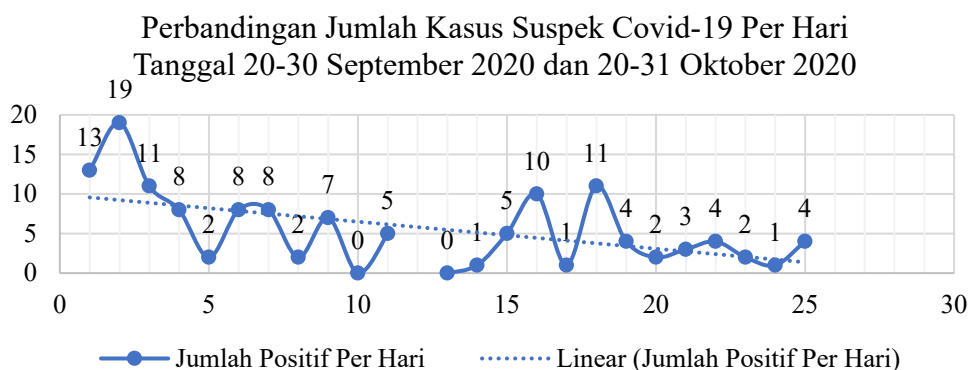
Dari klaster di atas bahwa adanya penularan yang disebabkan karena tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan dapat dipengaruhi oleh factor persepsi tentang Covid-19 yang selama muncul di masyarakat. Menurut Pareek (1996) dalam Sobur (2003: 386) persepsi merupakan proses penerimaan, seleksi, pengujian, dan memberikan reaksi pada rangsangan panca indra atau data. Maka dalam hal ini, tingkat kesadaran, kepedulian, dan sikap masyarakat Kota Yogyakarta dalam menghadapi Covid-19 dapat diuji melalui persepsi masyarakat.

Selama Bulan September 2020 kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta belum menunjukkan penurunan angka penularan, justru sebaliknya pada tanggal 19 September 2020 dalam keterangan Pemda DIY, Yogyakarta memecahkan rekor kasus penularan harian mencapai 74 kasus dengan rincian Kota Yogyakarta

sebanyak 23 kasus, Kabupaten Bantul 8 kasus, Kabupaten Kulonprogo 9 kasus, Kabupaten Gunungkidul 1 kasus, Kabupaten Sleman 32 kasus, masih dalam penelusuran 1 kasus.

Dengan adanya kasus penularan dari klaster-klaster di atas, dapat diartikan bahwa tingkat kerentanan penularan virus dapat terjadi di mana pun apabila seseorang mengabaikan protokol pencegahan virus. Meskipun demikian, pada sektor perekonomian dan pariwisata Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengatur secara khusus ke dalam peraturan wali kota atau surat edaran terkait keberadaan pasar-pasar tradisional, tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut tentu berlawanan dengan adanya penerbitan kebijakan pembatasan pertemuan masal, karena tidak adanya aturan yang mengatur pembatasan jarak sosial pada tempat-tempat yang rentan terjadinya kerumunan massa.

Gambar 2. Trend Kasus Covid-19 di Yogyakarta

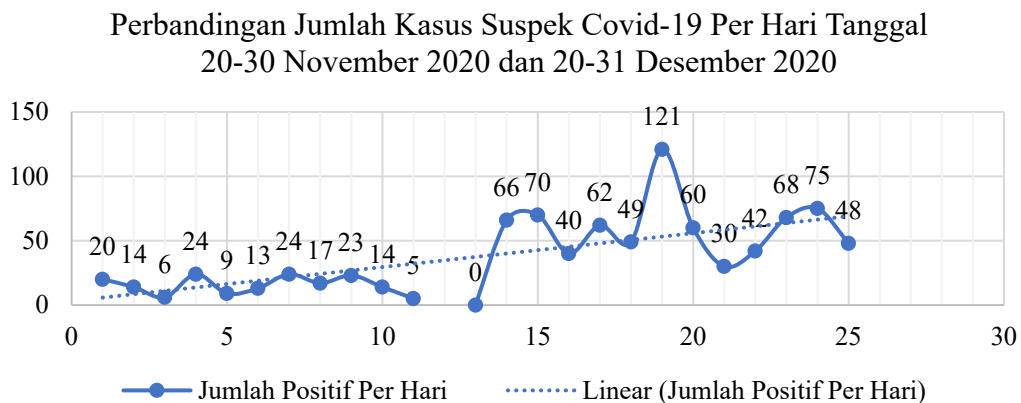


Sumber: *Humas Jogja*, 2020

Berdasarkan grafik penambahan jumlah kasus positif per hari di Kota Yogyakarta pada tanggal 20-30 September 2020 cenderung mengalami penurunan hingga pada tanggal 20-31 Oktober 2020. Hal tersebut menunjukkan perkembangan

yang baik jika terus ditingkatkan dengan penerapan protokol kesehatan untuk mencegah terjadi penambahan kasus.

Gambar 3. Trend Kasus Covid-19 di Yogyakarta



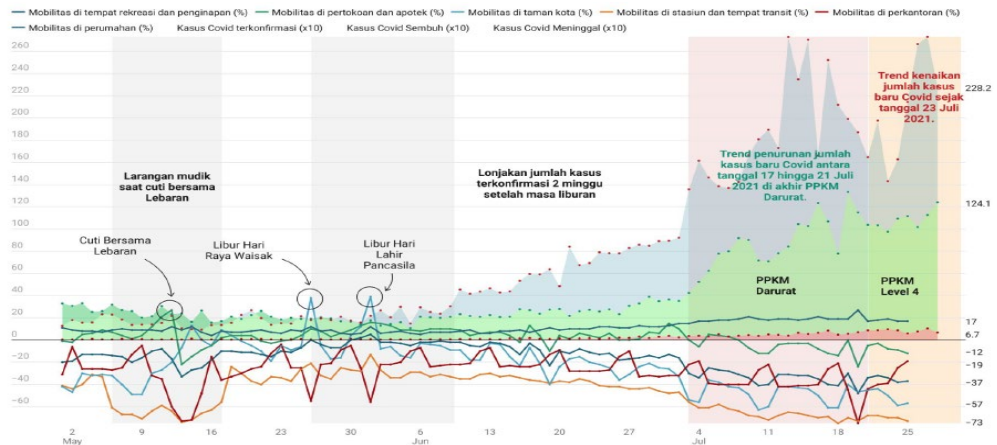
Sumber: *Humas Jogja, 2020*

Tetapi sepanjang Bulan November-Desember 2020 terjadi peningkatan jumlah kasus positif per hari. Hal tersebut jauh berbeda dengan jika merujuk pada Bulan September – Oktober 2020. Dari grafik jumlah penambahan kasus per hari di atas terjadi peningkatan yang signifikan pada Desember 2020. Anomali penambahan kasus yang terjadi tentu bukan tanpa sebab, karena pada saat itu bertepatan dengan masa libur panjang akhir tahun.

Meskipun sebelumnya sudah mendapat peringatan terkait penambahan jumlah pendatang pada masa liburan, namun belum ada tanggapan serius dari pemerintah kota menghadapi datangnya wisatawan dari luar kota. Karena selama ini memang sektor pariwisata adalah sumber pendapatan pokok yang menopang perekonomian Kota Yogyakarta. Sehingga masyarakat yang bergerak di bidang perekonomian pariwisata tetap harus menjalankan aktivitasnya.

Pandemi Covid-19 terjadi hingga tahun 2021, kondisi tersebut mengakibatkan pemerintah pusat memberlakukan kebijakan PPKM di seluruh wilayah Indonesia dengan kategori sesuai dengan risiko setiap daerah.

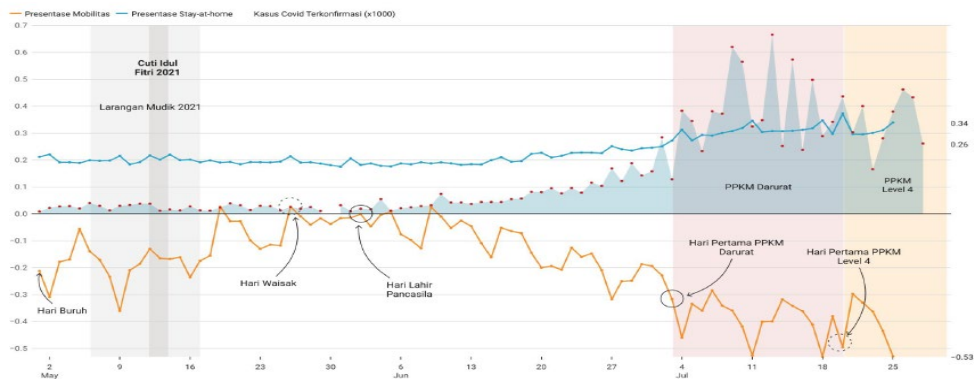
Gambar 4. Mobilitas Warga dan Trend Kasus Covid-19 di Provinsi DIY



Sumber: Data Humas Provinsi DIY

Selama penerapan kebijakan PPKM level 4 pada bulan Mei-Juli 2021, mobilitas warga turun di area pertokoan sebesar 5%, wisata dan penginapan 5%, stasiun dan transit 3%, dan perumahan 3%. Tetapi mobilitas di perkantoran sudah naik 20%. Sedangkan trend kasus Covid-19 masih cukup tinggi. Tetapi kondisi yang perlu diwaspadai terjadinya kenaikan kasus setelah masa liburan.

Gambar 5. Mobilitas Warga dan Trend Kasus Covid-19 di Kota Yogyakarta



Sumber: Data Humas Provinsi DIY

Sementara di Kota Yogyakarta selama PPKM level 4 pada bulan Mei-Juli 2021, aktivitas warga di rumah naik 5%, mobilitas di luar rumah turun 15% tetapi kasus Covid-19 masih naik sebanyak 50%. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah Kota Yogyakarta, pada masa liburan terjadi kenaikan mobilitas masyarakat di luar rumah. Meskipun sudah diberlakukan kebijakan larangan mudik 2021 tetapi pada hari-hari libur nasional masyarakat memanfaatkan untuk melakukan aktivitas di luar rumah.

Gambar 6. Grafik Perkembangan Kasus Konfirmasi Covid-19 di Kemantren Wilayah Kota Yogyakarta

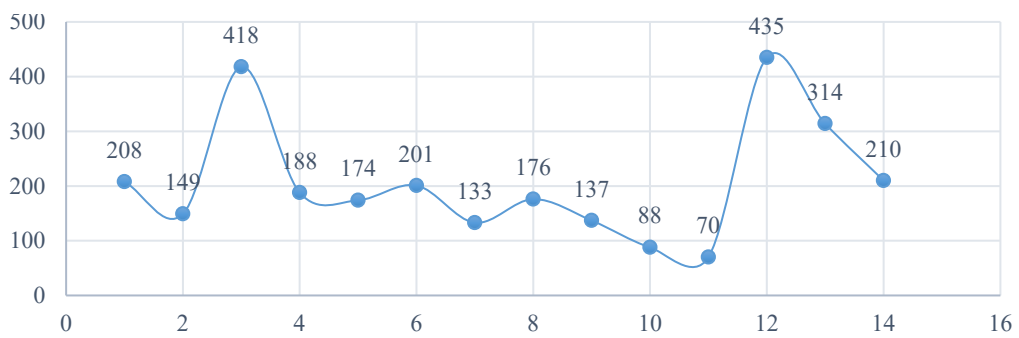


Table 2. Perkembangan Kasus Konfirmasi Covid-1 di Kemantren Wilayah Kota Yogyakarta

No.	Wilayah	Kemantren	Total Kasus
1.	Kota Yogyakarta	Umbulharjo	435
2.	Kota Yogyakarta	Gondokusuman	418
3.	Kota Yogyakarta	Mergangsan	314
4.	Kota Yogyakarta	Kotagede	210
5.	Kota Yogyakarta	Tegalrejo	208
6.	Kota Yogyakarta	Ngampilan	201
7.	Kota Yogyakarta	Danurejan	188
8.	Kota Yogyakarta	Mantrijeron	176
9.	Kota Yogyakarta	Gedongtengen	174
10.	Kota Yogyakarta	Jetis	149
11.	Kota Yogyakarta	Kraton	137
12.	Kota Yogyakarta	Wirobrajan	133
13.	Kota Yogyakarta	Gondomanan	88

Sumber: corona.jogjakota.go.id

Berdasarkan trend kasus Covid-19 di atas, terdapat lima kemantren di Kota Yogyakarta dengan kasus harian >200 dan kemantren dengan jumlah kasus tertinggi dari bulan September 2021 hingga bulan Oktober 2021 adalah Kemantren Umbulharjo dengan total 435 kasus. Dari perkembangan jumlah kasus di atas, Kemantren Umbulharjo adalah kemantren dengan kasus Covid-19 tertinggi di Kota Yogyakarta. Jika dibandingkan dengan kemantren lainnya, Kemantren Umbulharjo mempunyai jumlah kasus yang sangat tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya klaster-klaster penularan.

Langkah preventif perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, salah satunya dengan memetakan angka kasus Covid-19 setiap kemantren untuk menenakan jumlah dan mencegah penyebaran. Dengan demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta antara tahun 2020-2021 harus mempunyai kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Efektif dalam artian memahami situasi dan kondisi masyarakat dan tepat sasaran dalam pencegahan dan penanganan.

Sebelumnya Pemerintah Kota Yogyakarta telah meminta warganya untuk meningkatkan kesadaran menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus COVID-19 dan menekan angka penularan. Maka dengan demikian dalam hal ini masyarakat juga sebagai penentu dalam penanganan wabah COVID-19. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, muncul gagasan untuk meneliti tentang persepsi masyarakat Kota Yogyakarta terkait adanya wabah Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang terjadi di atas, wabah Covid-19 tidak hanya membahayakan bagi kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Berbagai sektor kehidupan manusia mengalami dampak yang signifikan. Maka bagaimana persepsi masyarakat Kota Yogyakarta dan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan Covid-19?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui persepsi masyarakat di Kota Yogyakarta dalam menghadapi Covid-19 terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi kepada beberapa pihak secara langsung dan tidak langsung.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan gambaran tentang masyarakat di Kota Yogyakarta dalam menghadapi wabah Covid-19 dan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini setelah mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam menghadapi Covid-19 terkait dengan kebijakan Pemerintah Kota

Yogyakarta dan dapat menjadi rekomendasi dari kebijakan yang selama ini sudah berjalan dalam menanggulangi wabah Covid-19.

1.5. Tinjauan Pustaka

Table 3. Tinjauan Pustaka

Peneliti	Judul	Metodologi	Hasil
Nailul Mona (2020)	Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia)	Metode analisis jaringan sosial	Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa virus corona dalam penyebarannya mempunyai karakteristik contagious. Virus ini dapat menyerang siapapun yang terhubung dengan pembawa virus dalam suatu jaringan sosial.
Herman & Mutiarin (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY	Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah menemukan perbedaan yang signifikan antara persepsi masyarakat yang menerima bantuan dan masyarakat yang tidak menerima bantuan BPJS berdasarkan pelayanan kesehatan.
Lomboan, dkk (2020)	Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pencegahan COVID-19 di Kelurahan Talikuran	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang diambil bersumber	Hasil dari penelitian ini menemukan adanya sebagian masyarakat yang belum memahami tentang virus corona. Akibatnya masyarakat berpersepsi bahwa

	Kecamatan Kawangkoan Utara	dari hasil wawancara.	hanya dengan menggunakan masker sudah merasa aman.
Herdiana (2020)	Persepsi Masyarakat Akan Pentingnya Social Distancing Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Di Indonesia (<i>The Perception Of Indonesians Concerning The Importance of Social Distancing As An Effort To 'Flatten The Curve' Of Covid -19 In Indonesia</i>)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan 6 parameter berdasarkan tipe perilaku dan aktifitas untuk menganalisa persepsi masyarakat.	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat Indonesia terkait penerapan sosial distancing menyatakan jika seseorang bisa saja berpersepsi bahwa kebijakan sangat penting, namun tidak dapat menahan diri untuk keluar rumah guna berbagai kepentingan.
Sari, dkk (2016)	Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik	Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif dengan Pendekatan Kuantitatif	Dari hasil penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebanyak 53,33% memberikan tanggapan positif, namun masyarakat masih berharap adanya perubahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sabir, (2016)	Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana	Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode fenomenologi dengan	Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa adanya perspektif eskapistik terhadap bencana yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kesulitan dalam memaknai realitas

		pendekatan kualitatif.	bencana, bahwa dengan lari dari bencana mereka menunjukkan bahwa realitas bencana merupakan realitas yang sebenarnya tak bisa dipahami oleh mereka.
--	--	------------------------	---

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rante & Mutiarin, 2016) dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif berjudul ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di RSUD Morangan Sleman DIY, menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terkait persepsi masyarakat dari variable pembayaran manfaat, pembiayaan pelayanan kesehatan dan pemberian informasi mengenai penyelenggaraan BPJS kesehatan. Perbedaan persepsi dari penelitian tersebut terletak pada ketentuan pembiayaan program dan mekanisme. Kedua terdapat pada informasi mengenai prosedur pendaftaran peserta BPJS dan informasi prosedur memperoleh pembiayaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menemukan sebanyak 53,33% responden memberi tanggapan positif, 1,67% memberikan persepsi negatif, dan 45% netral. Namun dalam hal ini responden berharap adanya upaya nyata yang harus dilakukan aparatur desa yakni dengan meningkatkan kualitas kerja, kuantitas kerja serta tanggung jawab akan hak-hak masyarakat. Memiliki sifat keterbukaan terhadap masyarakat karena dengan adanya teori Sifat, Menurut Judith R. Gordon menyatakan bahwa “seorang pemimpin harus memiliki karakter, seperti kemampuan intelektual, kematangan

pribadi, pendidikan, status sosial ekonomi, human relations, motivasi instrinsik dan dorongan untuk maju”.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sabir, 2016) menggunakan metode penelitian fenomenologi dengan pendekatan kualitatif menemukan bahwa persepsi masyarakat mengenai bencana tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara manusia, alam dan lingkungannya. Berbagai respon muncul dalam penelitian ini dalam memaknai realitas bencana, salah satunya adalah perspektif eskapistik terhadap bencana yang menunjukkan bahwa sebagian masyarakat kesulitan dalam memaknai realitas bencana, bahwa dengan lari dari bencana mereka menunjukkan bahwa realitas bencana merupakan realitas yang sebenarnya tak bisa dipahami oleh mereka.

Sementara itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lomboan et al., 2020) menemukan bahwa adanya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah sangat penting dan memberikan pengetahuan masyarakat terhadap wabah Covid-19. Sebab dalam penelitian ini menemukan adanya persepsi masyarakat yang tidak paham tentang adanya wabah Covid-19 akibatnya muncul persepsi kepanikan yang terjadi di masyarakat dan sebagian beranggapan bahwa hanya dengan menggunakan masker wabah tersebut dapat dicegah. Kemudian dari penelitian yang dilakukan oleh (Novira et al., 2020) dengan pendekatan kuantitatif deskriptif menemukan bahwa Seseorang dapat berpersepsi bahwa kebijakan sangat penting, namun tidak dapat menahan diri untuk keluar rumah guna berbagai kepentingan. perilaku mengurangi keluar rumah tidak dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, rendahnya pendidikan maupun rendahnya penghasilan. Jika bukan karena

pekerjaan dan mencari pemasukan. Sebanyak 29 responden menyatakan akan tetap menghadiri perayaan keagamaan massal dan atau pesta dan 56 responden akan tetap menyelenggarakan perayaan, pesta, atau seminar yang telah direncanakan sejak sebelum pandemi. Di saat yang sama, terdapat 137 responden yang menyatakan tetap akan mudik lebaran dan 191 responden yang menyatakan tetap beribadah di rumah ibadah seperti biasa.

1.6. Kajian Teori

1.6.1 Persepsi

Persepsi berasal dari bahasa latin *perception* atau *percipere* yang diartikan menerima atau mengambil. Menurut Leavitt (1978) dalam Sobur (2003: 385) persepsi juga dapat dipahami sebagai proses memahami suatu informasi dengan alat penginderaan, pada proses ini cara pandang terhadap suatu persepsi akan menentukan hasil dari sebuah proses tersebut. Maka persepsi masyarakat dapat melahirkan suatu penilaian terhadap sikap atau kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui perilaku dan tindakan yang dilakukan di masyarakat (Triyaningsih, 2020). Menurut (Chusna et al., 2019) persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Sedangkan menurut Pareek (1996:13) dalam Sobur (2003: 386) memberikan definisi tentang persepsi yang lebih luas. Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses penerimaan, menyeleksi, mengorganisasikan, menguji, dan memberikan reaksi pada rangsangan organisme pancaindra atau data.

Menurut Miftah Thoha (2003) dalam (Chusna et al., 2019) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang, sebagai berikut:

- a) Faktor internal: faktor ini berkaitan dengan perasaan, sikap, prasangka, keinginan atau harapan, nilai, kebutuhan dan motivasi.
- b) Faktor eksternal: faktor ini berkaitan dengan latar belakang pendidikan, keluarga, sumber pengetahuan yang diperoleh atau informasi yang didapatkan, dan kepekaan terhadap hal-hal baru yang didapatkan dari suatu objek.

Menurut Walgito (2003) terdapat 3 aspek utama dalam persepsi, sebagai berikut:

- a) Aspek Kognitif, berhubungan dengan pengetahuan, cara berfikir dan mendapatkan pengetahuan serta hal yang diperoleh dari hasil pikiran individu.
- b) Aspek Afeksi, berhubungan dengan kondisi emosi dan perasaan individu terhadap suatu objek atau kejadian tertentu dan menyangkut evaluasi kebaikan, keburukan berdasarkan emosi individu. Hal tersebut terjadi karena latar belakang pendidikan moral dan etika yang didapatkan sejak kecil.
- c) Aspek Konatif, berhubungan dengan motivasi atas perilaku dan aktivitas individu yang sesuai dengan persepsinya terhadap suatu keadaan atau objek tertentu.

Sementara itu tidak terlalu berbeda dengan Walgito menurut Sobur (2003: 387) menyatakan tiga komponen utama dalam persepsi adalah:

- a) Seleksi adalah proses penyaringan oleh pancaindra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya banyak atau sedikit.
- b) Intrepretasi merupakan proses mengorganisasikan informasi sehingga informasi tersebut dapat ditafsirkan atau mempunyai arti. Intrepetasi dapat dipengaruhi oleh banyak hal seperti, pengalaman masa lalu, system nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, kecerdasan. Intrepetasi juga bergantung pada kemampuan seseorang mengategorikan informasi yang didapatkan sebagai proses mereduksi informasi yang kompleks dan sederhana.
- c) Intrepretasi dan persepsi kemudian ditafsirkan dalam sikap atau tingkah laku sebagai reaksi. Maka proses persepsi dapat diartikan sebagai cara melalukan seleksi, intrepretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang diterimanya.

1.6.2 Faktor-Faktor Mempengaruhi Persepsi

Menurut Stephen P. Robins (2007) juga mengemukakan terdapat 3 aspek yang mempengaruhi persepsi, yaitu:

- a) Individu

Interpretasi seorang individu dalam memahami persepsi yang dipengaruhi sikap oleh karakteristik individual yang dimilikinya atas dasar sikap, pengalaman, pengetahuan, dan harapan.

- b) Sasaran

Sasaran dalam persepsi dapat berupa objek benda atau peristiwa yang mempengaruhi sifat-sifat individual terhadap persepsi yang dilihatnya. Hal

tersebut cenderung berpengaruh bagi seorang individual mengelompokan objek atau peristiwa sejenis dan memisahkannya dari peristiwa yang tidak serupa.

c) Situasi

Persepsi dilihat secara kontekstual yang dapat diartikan bahwa situasi merupakan faktor penentu dan berperan dalam pembentukan persepsi seseorang.

Sedangkan menurut Krech dan Crutchfield (1975) dalam Sobur (2003: 398) dalam proses yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat dikategorikan ke dalam 4 faktor, yaitu:

a) Faktor Fungsional

Berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat personal, seperti proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakang budaya, pendidikan yang kesemuanya diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Faktor-faktor fungsional yang lazim disebut sebagai kerangka rujukan (*frame of reference*). Kerangka rujukan ini mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan yang diterimanya atau mempersepsikannya. Di sini Krech dan Crutchfield merumuskan dalil persepsi pertama, bahwa persepsi bersifat selektif secara fungsional. Hal tersebut dapat diartikan jika seseorang memersepsi sesuatu akan memberikan tekanan yang sesuai dengan tujuan orang tersebut.

b) Faktor Struktural

Faktor struktural berasal semata-mata dari sifat fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Pada bagian ini Krech dan Crutchfield mengeluarkan dalil kedua bahwa, medan perseptual dan kognitif selalu diorganisasikan dan diberi arti. Meskipun stimuli yang diterima tidak lengkap tetapi akan menginterpretasikannya secara konsisten dengan rangkaian stimuli yang dipersepsikan.

Pada dalil ketiga, Krech dan Crutchfield mengungkapkan bahwa sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktur pada umumnya ditentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Sedangkan dalam dalil keempat, objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu atau menyerupai satu sama lain cenderung ditanggapi sebagai struktur yang sama.

c) Faktor Situasional

Faktor ini berkaitan dengan bahasa nonverbal. Seperti petunjuk proksemik, kinestetik, petunjuk wajah, petunjuk paralinguistic, adalah beberapa factor situasional yang mempengaruhi persepsi.

d) Faktor Personal

Faktor personal terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian. Menurut Leathers (1976: 26-32) dalam Sobur (2003: 399) pengalaman dapat membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman juga dapat bertambah melalui serangkaian peristiwa yang pernah dialami. Sementara motivasi berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi stimuli. Dalam hal ini jika seseorang sedang berada dalam kondisi di tengah wabah penyakit, orang akan cenderung memperhatikan kondisi kesehatan.

Kemudian kepribadian adalah ragam tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap serta berbeda dari individu lainnya.

1.7. Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Laswell dan Kaplan (Abidin, 2016) merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik. Sedangkan Friedrich berpendapat bahwa bagian paling pokok dalam suatu kebijakan, adanya tujuan (*goals*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). Kebijakan publik adalah sebuah instrumen pemerintah yang dapat diartikan bukan hanya menyangkut aparatur negara tetapi juga menyangkut pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan atau pilihan tindakan untuk mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial demi kepentingan publik, yaitu rakyat atau warga negara (Rante & Mutiarin, 2016).

Menurut Thoha (2012) dalam (Ramdhani & Ramdhani, 2017) kebijakan publik mempunyai dua aspek, yaitu:

- a) Kebijakan merupakan praktik sosial yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirumuskan berdasarkan segala kejadian yang berasal dari masyarakat.
- b) Kebijakan merupakan suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan keharmonisan dari pihak-pihak yang berkonflik maupun menciptakan tindakan bersama bagi para pihak untuk mencapai tujuan baik bersama.

Sementara itu menurut (Subarsono, 2006) menyatakan bahwa kebijakan publik mempunyai kerangka kerja yang akan ditentukan oleh beberapa variable sebagai berikut:

a) Tujuan yang akan dicapai

Mencakup kompleksitas tujuan yang dicapai. Apabila suatu kebijakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi maka akan sulit tercapai, namun jika kebijakan semakin sederhana akan semakin mudah untuk mencapainya.

b) Preferensi Nilai

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai varian nilai akan jauh lebih sulit tercapai jika dibandingkan dengan kebijakan yang hanya mempunyai satu nilai.

c) Sumber Daya

Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.

d) Aktor

Suatu kebijakan akan berkualitas jika dipengaruhi oleh orang-orang yang berkualitas dalam proses pembuatan kebijakan. Kualitas tersebut ditentukan oleh tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja dan integritas moral.

e) Lingkungan

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

f) Strategi

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat

bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

Menurut Bridgeman dan Davis (2004) dalam (Rante & Mutiarin, 2016) menerangkan bahwa kebijakan publik mempunyai tiga dimensi yang saling bertautan, yaitu, sebagai tujuan (*Objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal (*Authoritative Choice*), dan sebagai hipotesis (*Hypothesis*).

1.7.1 Kebijakan Publik Sebagai Tujuan

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan-tindakan yang didesain dan dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik. Karena itu dalam proses penyusunan kebijakan pemerintah perlu merumuskan kebijakan berdasarkan:

- a) Pernyataan resmi dari sebuah rancangan kebijakan yang akan dilakukan.
- b) Sebab akibat yang mendasari adanya kebijakan.
- c) Target dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu.

1.7.2 Kebijakan Sebagai Pilihan Tindakan yang Legal

Kebijakan publik dapat dilihat respon berdasarkan isu atau tanggapan terhadap masalah publik. Dengan demikian kebijakan publik dapat diartikan:

- a) Tujuan. Kebijakan publik menyangkut tujuan-tujuan pemerintah melalui sumber daya publik.
- b) Keputusan. Kebijakan publik menyangkut keputusan dan konsekuensi dari sebuah keputusan.
- c) Struktur. Mempunyai hierarki yang terstruktur dengan aktor-aktor kebijakan dan langkah-langkah yang jelas.

- d) Tindakan. Tindakan yang bersifat politis mengekspresikan dari pemilihan program lembaga eksekutif.

1.7.3 Kebijakan Sebagai Hipotesis

Kebijakan yang bersandar pada teori, model, atau hipotesis berkaitan dengan sebab dan akibat. Dalam hal ini, kebijakan harus mampu memperkirakan keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme untuk mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

1.8. Masyarakat

Menurut Emile Durkheim dalam (Tejokusumo, 2014) masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya antara satu dengan lainnya menjadi satu keterpaduan. Sementara itu menurut Soerjono Soekanto (1986) dalam (Tejokusumo, 2014) mengemukakan ciri-ciri masyarakat, yaitu:

- a) Manusia hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua individu.
- b) Bercampur dalam waktu yang cukup lama.
- c) Sadar akan kehidupan yang saling membutuhkan satu dengan lainnya.
- d) Merupakan suatu system yang dapat melahirkan kebudayaan sebagai pengikat anatara satu dengan lainnya.

Sedangkan menurut (Pasaribu, 2017) terdapat beberapa kriteria agar sekumpulan manusia dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu:

- a) Sistem tindakan utama.
- b) Kepercayaan pada system tindakan utama.
- c) Mampu bertahan hidup lebih dari masa hidup seorang anggota lainnya.

- d) Sebagai atau seluruh anggota baru didapat dari proses kelahiran dan reproduksi manusia.

1.9. Bencana

Menurut Shaluf (2007) dalam (Kusumasari, 2014) mengategorikan bencana menjadi tiga jenis, yaitu:

- a) **Bencana Alam**

Bencana alam terjadi karena disebabkan oleh factor alam, bencana ini digolongkan menjadi tiga jenis. Pertama, bencana geologi yang disebabkan karena aktivitas guncangan tektonik dan gunung berapi aktif. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir lahar dingin. Kedua, bencana hidrologi, disebabkan karena factor cuaca. Bencana ini dapat mengakibatkan banjir, angin topan, pasang air laut. Ketiga bencana biologi yang disebabkan oleh penyakit epidemic hewan atau tumbuhan.

- b) **Bencana Buatan Manusia**

Bencana ini terjadi bukan karena factor alam tetapi murni karena factor buatan manusia. Bencana ini digolongkan menjadi dua jenis, pertama bencana social yang disebabkan oleh kegagalan teknologi, kecelakaan transportasi, dan kesalahan rekonstruksi bangunan.

- c) **Bencana Hibrida**

Bencana hibrida adalah bencana yang penyebab terjadinya terdapat keterkaitan antara perilaku manusia dan alam. Contoh dari bencana hibrida antara lain polusi laut akibat pembuangan minyak, erosi tanah akibat

perusakan hutan, dan menyebarnya wabah penyakit dari satu orang ke masyarakat yang tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat (Kusumasari, 2014).

1.10. Hipotesis

- a) H1. Pengetahuan : pengetahuan masyarakat terkait dengan Covid-19.
- b) H1o : Tidak pengetahuan masyarakat terkait dengan penanganan Covid-19.

- c) H2. Emosi : adanya kesadaran masyarakat dalam penanganan Covid-19.
- d) H2o : Tidak adanya kesadaran masyarakat dalam penanganan Covid-19.

- e) H3. Perasaan : penanganan Covid-19 di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- f) H3o : Tidak adanya penanganan masyarakat di lingkungan keluarga dan masyarakat.

- g) H4. Motivasi : adanya motivasi masyarakat dalam penanganan Covid-19.
- h) H4o : Tidak adanya motivasi masyarakat dalam penanganan Covid-19.

- i) H5. Perilaku/Aktivitas : adanya perilaku masyarakat dalam penanganan Covid-19.
- j) H5o : Tidak adanya perilaku masyarakat dalam penanganan Covid-19.

1.11. Definisi Konseptual

1. Persepsi adalah pandangan seseorang terhadap suatu objek berdasarkan indera penglihatan. Suatu pandangan seseorang akan mempunyai perbedaan dari setiap individu yang akan menentukan sikap atas pandangan tersebut. Dalam persepsi masyarakat menurut teori Walgito terdapat 3 aspek dalam persepsi yaitu, aspek kognitif, aspek afeksi dan aspek konatif/psikomotor.
2. Kebijakan publik merupakan keputusan dari hasil kerja pemerintah yang menyangkut pengelolaan publik, menurut teori Soebarjo ada 6 kerangka kerja dalam kebijakan publik, yaitu tujuan, pereferensi nilai, sumber daya, aktor, lingkungan dan strategi.
3. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang bertahan hidup dalam suatu wilayah, adanya keterikatan sosial satu dengan lainnya dan berproses melahirkan suatu populasi baru yang berasal dari manusia.
4. Bencana
Menurut *United Nations Development Programme* (dalam Febri: 2017), bencana merupakan suatu gangguan yang cukup serius bagi masyarakat karena menimbulkan kerugian terhadap manusia yang akibatnya melebihi kemampuan masyarakat korban tertimpa bencana, dan dalam penanggulangannya hanya berasal dari sumber daya masyarakat itu sendiri.

1.12. Defisini Operasional

Penelitian Persepsi Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menghadapi Covid-19 merujuk pada teori Walgito tentang aspek-aspek yang terdapat dalam persepsi digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani Covid-19:

Table 4. *Definisi Operasional*

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Persepsi Masyarakat	Aspek Kognitif	<ol style="list-style-type: none">1) Mengetahui Surat Edaran Walikota Yogyakarta tentang Pencegahan Covid-19.2) Mengetahui cara pencegahan Covid-19.3) Menerapkan prokes.
2.	Persepsi Masyarakat	Aspek Afeksi	<ol style="list-style-type: none">1) Fakta ilmiah versus rekayasa terkait adanya Covid-19.2) Kekawatiran terpapar Covid-19.
3.	Persepsi Masyarakat	Aspek Konatif / Psikomotor	<ol style="list-style-type: none">1) Melaksanakan gerakan kerja bakti di lingkungan.2) Setiap warga melakukan cuci tangan setelah kontak langsung dengan orang atau benda.3) Membersihkan rumah.4) Melakukan gerakan kerja bakti kebersihan di kantor, sekolah, balai pertemuan dan ruang terbuka.5) Menyediakan alat pencegah Covid-19.6) Membekali diri sendiri dengan masker, cairan pembersih tangan <i>antiseptic</i>.7) Membatasi kegiatan bersifat masal.

1.13. Metode Penelitian

1.13.1. Metode dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Bagong dan Sutinah (2005: 135) metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang berupaya menghasilkan kesimpulan secara umum, baik untuk mengukur sampel atau populasi yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dengan teknik distribusi frekuensi. Menurut (Bungin, 2011) distribusi frekuensi bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang ditujukan langsung kepada responden.

1.13.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian persepsi masyarakat kota Yogyakarta dan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta dalam menghadapi Covid-19, Kecamatan Umbulharjo sebagai lokasi penelitian. Hal tersebut berdasarkan pada jumlah warga yang terpapar Covid-19 tertinggi berada di Kecamatan Umbulharjo. Lokasi penelitian juga menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kluster penularan terbesar sejak Covid-19.

1.13.3. Unit Analisis Data

Unit Analisa Data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Yogyakarta di Kecamatan Umbulharjo.

1.14. Teknik Pengambilan Populasi dan Sampel

1.14.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015:61) populasi adalah gambaran umum yang terdiri atas obyek dan subyek yang mempunyai kuantitas serta karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan total populasi:

Table 5. Jumlah Kepala Keluarga di Kemantren Umbulharjo

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Kelurahan Semaki	1735
2.	Kelurahan Muja-Muju	3599
3.	Kelurahan Tahunan	3043
4.	Kelurahan Warungboto	3028
5.	Kelurahan Pandeyan	4025
6.	Kelurahan Sorosutan	5104
7.	Kelurahan Giwangan	2545
Total		23,079

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta/Umbulharjo Tahun 2020

Table 6. Kepala Keluarga di Kelurahan Semaki

No.	Kemantren	Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	194
2.	Umbulharjo	RW 2	253
3.	Umbulharjo	RW 3	125
4.	Umbulharjo	RW 4	178
5.	Umbulharjo	RW 5	136
6.	Umbulharjo	RW 6	165
7.	Umbulharjo	RW 7	209
8.	Umbulharjo	RW 8	118
9.	Umbulharjo	RW 9	177
10.	Umbulharjo	RW 10	180
Total			1735

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 7. Kepala Keluarga di Kelurahan Muja Muju

No.	Kemantren	Wilayah	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	335
2.	Umbulharjo	RW 2	329
3.	Umbulharjo	RW 3	252
4.	Umbulharjo	RW 4	225
5.	Umbulharjo	RW 5	400
6.	Umbulharjo	RW 6	238
7.	Umbulharjo	RW 7	239
8.	Umbulharjo	RW 8	183
9.	Umbulharjo	RW 9	146
10.	Umbulharjo	RW 10	333
11.	Umbulharjo	RW 11	385
12.	Umbulharjo	RW 12	534
Total			3599

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 8. Kepala Keluarga di Kelurahan Tahunan

No.	Kemantren	RW	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	274
2.	Umbulharjo	RW 2	296
3.	Umbulharjo	RW 3	261
4.	Umbulharjo	RW 4	189
5.	Umbulharjo	RW 5	324
6.	Umbulharjo	RW 6	309
7.	Umbulharjo	RW 7	396
8.	Umbulharjo	RW 8	263
9.	Umbulharjo	RW 9	151
10.	Umbulharjo	RW 10	178
11.	Umbulharjo	RW 11	209
12.	Umbulharjo	RW 12	193
Total			3043

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 9. Kepala Keluarga di Kelurahan Warungboto

No.	Kemantren	RW	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	259
2.	Umbulharjo	RW 2	374
3.	Umbulharjo	RW 3	219

4.	Umbulharjo	RW 4	344
5.	Umbulharjo	RW 5	306
6.	Umbulharjo	RW 6	262
7.	Umbulharjo	RW 7	455
8.	Umbulharjo	RW 8	481
9.	Umbulharjo	RW 9	328
Total			3028

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 10. Kepala Keluarga di Kelurahan Pandeyan

No.	Kemantren	RW	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	249
2.	Umbulharjo	RW 2	368
3.	Umbulharjo	RW 3	306
4.	Umbulharjo	RW 4	449
5.	Umbulharjo	RW 5	268
6.	Umbulharjo	RW 6	455
7.	Umbulharjo	RW 7	199
8.	Umbulharjo	RW 8	325
9.	Umbulharjo	RW 9	216
10.	Umbulharjo	RW 10	436
11.	Umbulharjo	RW 11	300
12.	Umbulharjo	RW 12	268
13.	Umbulharjo	RW 13	186
Total			4025

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 11. Kepala Keluarga di Kelurahan Sorosutan

No.	Kemantren	RW	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	199
2.	Umbulharjo	RW 2	285
3.	Umbulharjo	RW 3	134
4.	Umbulharjo	RW 4	246
5.	Umbulharjo	RW 5	213
6.	Umbulharjo	RW 6	308
7.	Umbulharjo	RW 7	403
8.	Umbulharjo	RW 8	411
9.	Umbulharjo	RW 9	425
10.	Umbulharjo	RW 10	268
11.	Umbulharjo	RW 11	400
12.	Umbulharjo	RW 12	285
13.	Umbulharjo	RW 13	381
14.	Umbulharjo	RW 14	334

15.	Umbulharjo	RW 15	324
16.	Umbulharjo	RW 16	164
17.	Umbulharjo	RW 17	190
18.	Umbulharjo	RW 18	134
Total			5104

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

Table 12. Kepala Keluarga di Kelurahan Giwangan

No.	Kemantren	RW	Jumlah Penduduk
1.	Umbulharjo	RW 1	243
2.	Umbulharjo	RW 2	105
3.	Umbulharjo	RW 3	118
4.	Umbulharjo	RW 4	258
5.	Umbulharjo	RW 5	160
6.	Umbulharjo	RW 6	280
7.	Umbulharjo	RW 7	145
8.	Umbulharjo	RW 8	210
9.	Umbulharjo	RW 9	107
10.	Umbulharjo	RW 10	201
11.	Umbulharjo	RW 11	247
12.	Umbulharjo	RW 12	174
13.	Umbulharjo	RW 13	297
Total			2545

Sumber: Dinas Catatan Sipil Kota Yogyakarta Tahun 2020

1.14.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari populasi dan karakteristik yang diteliti. Sampel juga dapat diartikan sebagai representasi dari populasi yang ada dalam suatu wilayah atau obyek yang akan diteliti. Maka dalam menentukan banyaknya sampel yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus Sloving yang dikutip dalam Bungin (2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: banyaknya unit sampel

N: banyaknya populasi

d^2 : tariff nyata 0,10 (0,01, 0,05, 0,10. Tarif nyata dapat dipilih oleh peneliti)

1: bilangan konstanta

Berdasarkan rumus tersebut, akan diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n \frac{23.079}{23.079 \cdot 0,10^2 + 1} = 99,56$$

Sampel ($n=100$ orang)

Menurut Rahmat (1997: 82) selanjutnya menentukan jumlah sampel per kelompok dari sampel yang telah didapatkan yaitu dengan menggunakan rumus penentuan sampel agar lebih proporsional. Teknik pengambilan *stratified random sampling* dengan menggunakan *proportionate stratified random sampling* pengambilan sampel yang apabila populasi mempunyai anggota atau unsur heterogen dan berstrata proporsional (Sugiyono, 2009). Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas maka pengambilan sampel kelompok dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$ni \frac{Ni}{N} \times n$$

Keterangan:

Ni: jumlah populasi masing-masing kelompok

N: jumlah keseluruhan kelompok

n: jumlah sampel yang diambil

Berdasarkan rumus pengambilan sampel, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang yang di turunkan dari distribusi 6 (enam) kelurahan berdasarkan tempat tinggalnya, yang dapat dilihat dibawah ini:

a. Masyarakat Kelurahan Semaki:

$$ni \frac{1735}{23079} x 100 = 7.51 \text{ (dibulatkan menjadi 8 orang)}$$

b. Masyarakat Kelurahan Muja-Muju

$$ni \frac{3599}{23079} x 100 = 15.59 \text{ (dibulatkan menjadi 16 orang)}$$

c. Masyarakat Kelurahan Tahunan

$$ni \frac{3043}{23079} x 100 = 13.18 \text{ (dibulatkan menjadi 13 orang)}$$

d. Masyarakat Kelurahan Warungboto

$$ni \frac{3028}{23079} x 100 = 13.12 \text{ (dibulatkan menjadi 13 orang)}$$

e. Masyarakat Kelurahan Pandeyan

$$ni \frac{4025}{23079} x 100 = 17.44 \text{ (dibulatkan menjadi 17 orang)}$$

f. Masyarakat Kelurahan Sorosutan

$$ni \frac{5104}{23079} x 100 = 22.11 \text{ (dibulatkan menjadi 22 orang)}$$

g. Masyarakat Kelurahan Giwangan

$$ni \frac{2545}{23079} x 100 = 11.02 \text{ (dibulatkan menjadi 11 orang)}$$

1.14.3. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2013) kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yang akan dijadikan objek

penelitian. Kuisisioner ini dapat diberikan responden secara langsung maupun dikirim melalui internet. Pada penelitian ini, kuisisioner akan diberikan kepada warga Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagai salah satu kecamatan dengan tingkat penularan virus Covid-19 tertinggi se Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur hasil kuisisioner yang dijawab oleh responden menggunakan skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2013) digunakan untuk mengukur pendapat dan sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Setiap jawaban yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif hingga sangat negatif. Berikut bobot penilaian dalam skala likert.

Table 13. Skala Likert

Kode	Pertanyaan	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
ST	Setuju	4
RG	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono (2013)

1.14.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai sumber data untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif.

1.14.4.1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2013) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil kuisisioner yang disebar kepada Masyarakat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Kota Yogyakarta dengan

tingkat penularan virus Covid-19. Sehingga dapat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.14.4.2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) data sekunder adalah data yang mendukung penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung serta dapat dihasilkan oleh media, dokumen atau informasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan penelitian.

1.14.5. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Metode kuisisioner adalah serangkaian daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis kemudian diberikan kepada responden (Bungin, 2011). Kuisisioner dalam penelitian ini akan disebarakan kepada warga Kecamatan Umbulharjo sebagai responden. Dalam penyebaran kuisisioner tidak terkait warga tersebut pernah terpapar virus atau belum.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah langkah pengumpulan data dengan mengamati atau menganalisis data yang dibuat oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh pihak lain terkait suatu subjek. Maka dari itu dapat dikatakan pula bahwa dokumen adalah sejumlah data dan fakta yang tersimpan dalam wadah yang berwujud dokumentasi. Hampir sejumlah data yang ada adalah berwujud surat-surat, laporan, dan sebagainya.

1.14.6 Teknik Analisis Data

1.14.6.1 Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pengolahan data meliputi memeriksa (editing), proses pemberian identitas (coding), pemberian nilai (scoring) dan proses pembeberan (tabulation).

- a. Editing, Editing yaitu memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden mana yang relevan. Editing data merupakan proses pengoreksian dan pengecekan terhadap angket yang telah dijawab oleh responden apakah sudah dijawab secara lengkap atau belum, seandainya sudah dijawab apakah sudah benar.
- b. Coding, pemberian data, simbol atau kode bagi tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Maksudnya adalah angket yang telah diedit diberi identitas sehingga memiliki arti dapat diproses pada tahap pengolahan data lebih lanjut.
- c. Scoring, memberi angka pada lembar jawaban angket tiap subyek skor dari tiap item atau pertanyaan pada angket ditentukan sesuai dengan perangkat pilihan (option). Pada tahap ini, kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan menggunakan tanda checklis, ketika diinput diubah menjadi angka untuk kemudian dapat dihitung berapa persentase dan juga frekuensinya.
- d. Tabulasi, memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Pembuatan table dan memasukkan data hasil angket ke dalamnya sebagai persiapan analisis data melalui penerapan rumus statistik yang dipilih.

1.14.6.2 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistic deskriptif dengan teknik distribusi frekuensi. Menurut (Bungin, 2011) distribusi frekuensi bertujuan untuk menggambarkan keadaan gejala sosial yang sedang terjadi dengan memanfaatkan *software SPSS windows*.

Kuesioner Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan *Coronavirus Disease (Covid-19)* Studi Kasus Kemantren Umbulharjo

Dalam penelitian ini skala yang digunakan untuk mengukur hasil kuisisioner yang dijawab oleh responden menggunakan skala likert. Skala likert menurut Sugiyono (2013) digunakan untuk mengukur pendapat dan sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Setiap jawaban yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi penilaian dari sangat positif hingga sangat negatif. Berikut bobot penilaian dalam skala likert.

Kode	Pertanyaan	Bobot Nilai
SS	Sangat Setuju	5
ST	Setuju	4
RG	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Jawaban dengan mengisi tanda pada kolom angka yang tertera pada setiap pernyataan dengan penjelasan sebagai berikut

No.	Pertanyaan	Penilaian					
		1	2	3	4	5	6
A.	Pengetahuan						
1.	Seberapa sering anda menjaga jarak ketika di rumah						
2.	Seberapa sering anda mencuci tangan						
3.	Seberapa sering anda menggunakan masker ketika keluar rumah						
4.	Seberapa patuh anda terhadap protokol kesehatan						
5.	Sumber informasi terkait <i>Covid-19</i> yang anda percaya						

	a) Keluarga							
	b) Selebritas/Influencer							
	c) Dokter/Pakar kesehatan							
	d) Tokoh Agama							
	e) Pejabat Pemerintah							
B. Emosi Perasaan								
1.	Apakah anda percaya virus <i>COVID-19</i> dibuat sengaja oleh manusia							
2.	Seberapa besar anda membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah							
3.	Seberapa penting faktor ekonomi dibanding faktor kesehatan							
C. Kekawatiran								
1.	Seberapa besar kekhawatiran anda terpapar <i>COVID-19</i>							
	a) Saat berada di pasar dan pusat perbelanjaan							
	b) Saat berada di kantor, sekolah, kuliah							
	c) Saat berada di hajatan							
	d) Saat berada di transportasi umum							
	e) Saat berada di tempat ibadah							
D. Motivasi								
1.	Kepedulian dengan kondisi kesehatan dan ekonomi orang-orang di sekitar tempat tinggal dan kerja							
	a) Melaksanakan gerakan bersih-bersih kampung							
	b) Dorongan untuk membantu tetangga yang sakit							
2.	Menyediakan protokol kesehatan							
	a. Di rumah							
	b. Di luar rumah (kantor, kampus, dsb)							

Kuesioner bersumber dari turunan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diatur dalam surat edaran wali kota.